



FADJAR TRI SAKTI, ayah dari 3 putri (*nadya, nabila, nayla*) lahir di Kota Banjarmasin. Putra ke-3 dari 6 bersaudara.

Pendidikan: diawali pada Tahun 1970 di TK Assalam Bandung, SD Islam Teladan Yasma PB Sudirman Jakarta Tahun 1979, SMPN 102 Jakarta Tahun 1982, SMAN 14 Bandung Tahun 1985. Melanjutkan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Administrasi Negara lulus Tahun 1990, Tahun 2003 melanjutkan studi Program Magister Ilmu Administrasi lulus Tahun 2005, pada Tahun 2007 melanjutkan Program Doktor Ilmu Sosial,

lulus Ujian Sidang Terbuka Promosi Doktor pada Tanggal 3 Januari 2011, semua jenjang pendidikan tingginya dilalui di **Universitas Pasundan Bandung**.

Awal karirnyapun dimulai di Universitas Pasundan pada Tahun Akademik 1991/1992 sebagai staf pengajar, diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan dpk Fisip Unpas pada Tahun 1994. Jabatan akademik terakhirnya **Lektor Muda**. Tahun 1998 diterima sebagai **CPNS** Pemda Kotamadya DT. II Bandung; tugas pertamanya sebagai pelaksana pada Kantor **Kecamatan Batununggal**. Tahun 1998 mutasi ke Bappeda. Pasca re-strukturisasi kelembagaan Tahun 2008 rotasi ke Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah (ORPAD) pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, Tahun 2009 rotasi ke Bagian Pembangunan dan SDA (BPSDA) pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, hingga awal Tahun 2015 kembali ke Bappeda Kota Bandung. Pada September 2016 **penulis alih fungsi menjadi Dosen Tetap pada FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung**.

Alumni Resimen Mahasiswa penggemar mobil lawas pernah mengenyam pendidikan Kursus Calon Dosen Kewiraan (SUSCADOSWIR) Angkatan-XXXV Tahun 1993 di **Lemhannas** Jakarta, Diklatpim IV Tahun 2000, Kursus Pemantauan dan Evaluasi di LPEM FE-UI Tahun 2003, **Diklat** Penyusunan LAKIP Tahun 2004, **Diklat** Standar Pelayanan Minimal Tahun 2009, **Diklat** Penyusunan Raperda Tahun 2014, dan **Diklat** *Planing And Budgeting* Tahun 2015.

Penghargaan yang pernah diraih Satyalencana Karya Setya XX Tahun 2019 dari Presiden Republik Indonesia.

Penulis :

Fajar Tri Sakti

SISTEM POLITIK INDONESIA

Sistem Politik Indonesia

Diterbitkan oleh : **FISIP UNPAS PRESS** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan

Jalan Lengkong Besar 68 Bandung 40261, telpon/fax. 022 4205945, 4210656, email: fisip@unpas.ac.id

Penyunting:

Editor : Kokoy Sukandar

Desain cover : Deddy Erawan

Cetakan pertama Januari 2020

ISBN: 978-602-0942-23-0

Hak cipta dilindungi Undang-Undang dilarang memperbanyak tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis penerbit.

BAB VII PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PILPRES, PILKADA

7.1 Peraturan Perundang-undangan	81
7.2 Undang-undang	81
7.3 Pengertian Pemilu Menurut Undang-undang	82
7.4 Asas Pemilihan Umum	82
7.5 Dasar Hukum	84
7.6 Dasar Hukum Pemilu	84
7.7 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	85
7.8 Pemilihan Langsung Kepala Daerah	55

BAB VIII PROSES SISTEM POLITIK DAN KAPABILITAS SISTEM POLITIK

8.1 Pengertian Sistem Politik	91
8.2 Proses Politik di Indonesia	93
8.3 Sejarah Sistem Politik Di Indonesia	97
8.4 Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Politik	100

BAB IX PENDEKATAN PEMBANGUNAN POLITIK MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

9.1 Pengertian Pembangunan Politik	103
9.2 Tujuan Pemangunan Politik	105
9.3 Konsep Pembangunan Politik	107
9.4 Pendekatan Pembangunan Politik	110

BAB X PROSES POLITIK DAN DIMENSI SEJARAH

10.1 Pengertian Proses Politik di Indonesia	112
10.1.1 Pengertian Proses	112
10.1.2 Pengertian Politik	113

10.2 Proses Politik Indonesia dan Dimensi Sejarah	115
10.2.1 Zaman Demokrasi Liberal	115
10.2.2 Zaman Demokrasi Terpimpin	121
10.2.3 Zaman Demokrasi Pancasila	126

BAB XI FILSEFAT ADMINISTRASI

11.1 Filsafat	139
11.1.1 Pengertian Filsafat	139
11.1.2 Karakteristik Berfikir Filsafat	140
11.2 Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi	142
11.3 Pengertian Aksiologi	144
11.4 Administrasi	144
11.5 Administrasi Negara	152
11.6 Administrasi Niaga	154
11.7 Filsafat Administrasi	155

DAFTAR PUSTAKA	157
-----------------------------	-----

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I TEORI SISTEM DAN PENDEKATAN SISTEM	
1.1 Teori Sistem	1
a) Pengertian Sistem	1
b) Elemen dalam Sistem	3
c) Jenis Sistem	3
1.2 Pendekatan Sistem	8
a) Pengertian Pendekatan Sistem	8
b) Tahap dan Langkah Pendekatan Sistem	9
BAB II KONSTRUKSI MODEL DAN ANALISIS SISTEM	
2.1 Pengertian Sistem Politik	11
2.2 Unsur-unsur Sistem Politik	13
2.3 Ciri-ciri Sistem Politik	13
2.4 Model-model Sistem Politik	14
BAB III BUDAYA POLITIK, TIPE BUDAYA POLITIK DAN BUDAYA POLITIK DI INDONESIA	
3.1 Pengertian Budaya Politik	21
3.2 Ciri-ciri Budaya Politik	22
3.3 Tipe Budaya Politik	23
3.4 Budaya Politik di Indonesia	27

BAB IV STRUKTUR POLITIK	
4.1 Pengertian Struktur Politik	28
4.2 Fungsi Infrastruktur	28
4.3 Fungsi Suprastruktur	30
4.4 Fungsi Politik	31
BAB V SISTEM KEPARTAIAAN DAN SISTEM PEMILU	
5.1 Definisi Sistem Kepartaian	33
5.2 Syarat Untuk Menjadi Anggota Partai	35
5.3 Klasifikasi Sistem Kepartaian	37
5.4 Pemilu	40
5.5 Asas-asas Pemilu	41
5.6 Tujuan dan Fungsi Pemilu	42
5.7 Ciri-ciri Pemilu	45
5.8 Sistem Pemilu di Indonesia	48
5.9 Badan Penyelenggara Pemilu	50
5.10 Perkembangan Sistem Pemilu di Indonesia	39
BAB VI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ORMAS, PARPOL, DAN PILEG	
6.1 Pengertian Ormas	61
6.2 Hak dan Kewajiban Parpol	62
6.3 Pengertian Parpol	65
6.4 Pengertian Pileg	77
6.5 Fungsi Pileg	78
6.7 MPRS dan DPR-GR	79

BAB I

TEORI SISTEM DAN PENDEKATAN SISTEM

1 TEORI SISTEM

Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*sustema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggerakya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut. Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan

benda yang memiliki hubungan di antara mereka.

Sistem memiliki objek yang beragam, mulai dari hal fisik misalnya untuk organisme dan barang elektronik, pada dunia sosial misalnya untuk menyebut sebuah organisasi, sampai ke dunia ide misalnya "sistem nilai. Konsep "pemikiran sistem" lahir dari dunia ilmu alam yang digeluti Herbert Spencer dan penerusnya, serta bidang biologi oleh HJ Henderson dan pengikutnya. Konsep sistem telah digunakan dalam ilmu ekonomi, antropologi, psikologi, ilmu politik, sosiologi, dan terutama dalam teori organisasi.

Sistem terdapat dalam tubuh manusia sebagai unit fungsi fisiologis, dalam suatu organisme berupa fungsi dan proses vital di dalamnya, dalam sekumpulan komponen mekanik dan elektrik pada benda elektronik, dalam suatu jaringan saluran sehingga memungkinkan untuk berkomunikasi, atau dalam suatu jaringan komputer yang saling terhubung dalam satu kantor misalnya. Sistem juga dapat bermakna sejumlah ide dan prinsip yang saling berhubungan yang terorganisasi, sebagai suatu bentuk organisasi sosial-ekonomi-politik, atau sebagai sejumlah objek dan fenomena yang berkelompok bersama. Dalam makna sistem sebagai suatu organisasi dari sejumlah element dan bagian yang bekerja sebagai sebuah unit, maka beberapa kata yang dekat dengan pengertian ini adalah *entity*, *integral*, *sum*, *totality*, dan *whole*. Sistem juga dapat bermakna sebagai sejumlah bagian yang berkomposisi saling terkoneksi, atau disebut sebagai kompleks (*complex*). Dan, dalam makna sebagai susunan dan desain yang sistematis, maka ia dekat dengan kata-kata: *method*, *order*, *orderliness*, *organization*, *pattern*, *plan*, *systematization*, dan *systemization*. Sedangkan, sebagai pendekatan yang digunakan untuk melihat sesuatu,

makna sistem tergambar dalam kata-kata: *fashion*, *manner*, *method*, *mode*, *modus operandi*, *style*, dan *way*.

Sebuah sistem, adalah sebuah komposisi dari sejumlah element yang saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah kesatuan yang padu (a unified whole). Kata "sistem" berasal dari bahasa Latin and Yunani yang bermakna sebagai "combine, to set up, to place together". Jadi, sebuah sistem berisi komponen atau elemen, yang saling terkoneksi secara bersama-sama dalam tujuan untuk memfasilitasi aliran informasi, materi, maupun energi. Setiap objek mestilah merupakan sebuah sistem.

b. Elemen dalam sistem

Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri atas empat elemen:

1. **Objek**, yang dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel. Ia dapat benda fisik,
2. **Abstrak**, ataupun keduanya sekaligus; tergantung kepada sifat sistem tersebut.
3. **Atribut**, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya.
4. **Hubungan internal**, di antara objek-objek di dalamnya.
5. **Lingkungan**, tempat di mana sistem berada.

c. Jenis sistem

Ada berbagai tipe sistem berdasarkan kategori:

a. Atas dasar keterbukaan:

- Sistem terbuka, dimana pihak luar dapat mempengaruhinya.
- Sistem tertutup.

BAB II

KONSTRUKSI MODEL DAN ANALISIS SISTEM

Pengertian Sistem Politik

Pengertian Sistem

- **Secara Etimologis** : Sistem berasal dari bahasa Yunani, *syn* dan *histanai* yang berarti menempatkan bersama.
- **Gabriel Almond** : Sistem mengandung arti saling ketergantungan antar bagian-bagian dan ikatan antar bagian-bagian tersebut dengan lingkungannya.

Pengertian Politik

- **Secara etimologis**
Istilah politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang mengandung arti negara kota.
- **Roger F. Soltau**
Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu.
- **Harold J. Laswell dan A. Kaplan**
Ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian

kekuasaan.

– **David Easton**

Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum.

- **Politik** adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

3. Pengertian Sistem Politik

Easton

Sistem politik merupakan keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara otoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dari atas nama masyarakat. Pembagian dan penetapan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang penetapannya bersifat paksaan atau dengan kewenangan dan mengikat masyarakat secara keseluruhan.

Almond

Sistem politik yang pada hakikatnya melaksanakan fungsi-fungsi mempertahankan kesatuan masyarakat, menyesuaikan dan merubah unsur pertautan hubungan, agama, dan sistem ekonomi, melindungi kesatuan sistem politik dan ancaman-ancaman dari luar atau mengembangkannya terhadap masyarakat lain atau menyerangnya.

Sistem politik adalah serangkaian unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan dalam negara untuk memperoleh kekuasaan

dan turut serta mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan.

2.2 UNSUR-UNSUR SISTEM POLITIK

- **Comprehensiveness (menyeluruh)** : Artinya sistem politik mencakup semua interaksi, baik berupa masukan (input) maupun keluaran (output) yang mempengaruhi penggunaan atau cara penggunaan paksaan.
- **Interdependence (saling ketergantungan)** : Artinya perubahan pada salah satu aspek akan menyebabkan perubahan pada seluruh sistem.
- **Boundaries (adanya batasan-batasan)** : Artinya terdapat batas-batas antara sistem politik dengan sistem sistem lainnya sehingga ada ketegasan dan kejelasan mengenai wilayah kajian sistem politik.

2.3 CIRI-CIRI SISTEM POLITIK

Ciri Semua sistem politik, termasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik. Diantara lain:

1. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaan struktur
2. Semua struktur politik biar bagaimanapun spesialisasinya melaksanakan banyak fungsi.
3. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan.

BAB III

BUDAYA POLITIK, TIPE BUDAYA POLITIK DAN BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Pengertian Budaya Politik

Budaya berasal kata “budhayah” yang berarti akal, atau dapat juga didefinisikan secara terpisah yaitu dengan dua kata “budi” dan “daya” yang apabila digabungkan menghasilkan arti mendayakan budi atau menggunakan akal budi tersebut. Sedangkan politik berasal dari kata “politicos” yang berarti dari, untuk atau yang berkaitan dengan warga negara. Bila menyangkut dengan sistem politik yang dianut suatu negara beserta segala unsur (pola bersikap dan pola bertingkah laku) yang terdapat didalamnya. Sikap dan tingkah laku politik seseorang menjadi suatu objek penanda gejala politik yang akan terjadi pada orang tersebut dan orang-orang yang berada dibawah politiknya.

Secara umum, pengertian budaya politik adalah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati terhadap seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat secara sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil

keputusan dan kebijakan publik untuk masyarakat. Secara sederhana, pengertian budaya politik adalah nilai-nilai yang berkembang dan dipraktikkan suatu masyarakat tertentu dalam bidang politik.

Pengertian budaya politik menurut para ahli :

- Austin Ranney (1920-2006) : pengertian budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.
- Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell Jr. (1911-2002): pengertian budaya politik adalah sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.
- Sidney Verba (1932) : budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.
- Mochtar Massoed : pengertian budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.
- Miriam Budiardjo (1923-2007) : budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.

3.2 Ciri-Ciri Budaya Politik

1. Adanya pengaturan kekuasaan

2. Perilaku aparat aparat Negara
3. Proses kebijakan pemerintah
4. Terdapat kegiatan partai politik
5. Terdapat gejolak masyarakat pada kekuasaan yang memerintah
6. Pola pengalokasian sumber sumber masyarakat
7. Terdapat budaya politik masalah legitimasi

3.3 Tipe Budaya Politik

- a. Tipe Budaya Politik Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan

Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memadukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap militan atau toleransi.

- 1) Budaya Politik Militan

Budaya politik yang tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Jika terjadi krisis, yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.

- 2) Budaya Politik Toleransi

Budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar dengan selalu membuka pintu untuk bekerja sama, sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.

BAB IV

STRUKTUR POLITIK

4.1 Pengertian Struktur Politik

Struktur politik berasal dari dua kata, yaitu struktur dan politik. Struktur adalah pengembangan hubungan organisasi antara komponen yang membentuk bangunan itu sedangkan politik berarti urusan Negara. Jadi secara harfiah struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan Negara. Struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan negara. Struktur politik selalu berkenaan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. (A.Rachman.2007 : 6). Kekuasaan berarti sebuah kapasitas, kapabilitas atau kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai dan memerintah orang lain. Ketika berbicara struktur politik maka yang akan diperbincangkan adalah tentang mesin politik sebagai lembaga yang dipakai untuk mencapai tujuan.

4.2. Fungsi Infrastruktur

- Pendidikan politik
Adalah fungsi untuk peningkatan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam system politiknya

- Artikulasi kepentingan
Adalah lembaga yang berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat seperti LSM, Ormas, dan OKP.
- Agregasi kepentingan
Adalah lembaga yang berfungsi memadukan aspirasi rakyat yang disampaikan oleh lembaga, misalnya partai politik
- Rekrutment politik
Adalah lembaga yang berfungsi melakukan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi rakyat
- Komunikasi politik.
Adalah kegiatan yang berguna untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat

Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalannya kerjasama yang baik dan Profesional diantara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara.

Faktor yang bersifat informal yang dalam kenyataan mempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, menkonfirmasi dukungan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Kelompok ini termasuk golongan penekan, with input, alat komunikasi massa dan lain-lain. Struktur semacam ini dapat berupatatan yang tak tampak secara jelas tetapi berpengaruh, dan eksistensinya dapat dirasakan karena fungsi yang mengalir sehingga pendekatan yang digunakan kemudian disebut struktural fungsional. adapun Unsur Infrastruktur Politik diantaranya:

1. Kelompok Kepentingan
2. Kelompok Penekan

BAB V

SISTEM KEPARTAIAN DAN SISTEM PEMILU

Definisi Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian adalah “pola kompetisi terus-menerus dan sifat stabil, yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap era.” Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung pada majemuk suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Selain itu, sistem politik yang telah disebutkan, turut mempengaruhi sistem kepartaian yang ada.

Menurut Ramlan Subekti (1992) - Sistem Kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi diantara partai politik dalam suatu sistem politik.

Austin Ranney (1990) - Sistem Kepartaian adalah pemahaman terhadap karakteristik umum konflik partai dalam lingkungan dimana mereka berkiprah yang dapat digolongkan menurut beberapa kriteria.

Riswanda Imawan (2004) - Sistem Kepartaian adalah pola interaksi partai politik dalam satu sistem politik yang

menentukan format dan mekanisme kerja satu sistem pemerintahan.

Hague and Harrop (2004) - Sistem Kepartaian merupakan interaksi antara partai politik yang perolehan suaranya signifikan.

Sistem kepartaian belumlah menjadi seni politik yang mapan. Artinya, tata cara melakukan klasifikasi sistem kepartaian belum disepakati oleh para peneliti ilmu politik. Namun, yang paling mudah dan paling banyak dilakukan peneliti adalah menurut jumlah partai yang berkompetisi dalam sistem politik. Peter Mair memuatnya dalam tabel berikut :

Tabel Sistem Kepartaian

Peneliti	Kriteria klasifikasi	Sistem kepartaian
Maurice Duverger	Jumlah partai	- Sistem dua partai. - Sistem multi partai
Robert Dahl	Kompetitif oposisi	- Kompetitif-murni - Kompetitif-kooperatif - Kompetitif koalisi - Koalisi murni
Blondel	Jumlah partai : ukuran partai secara	- Sistem relatif partai - Sistem partai dan setengah partai - Multi partai tanpa partai yang dominan
Giovani Sartori	Jumlah partai dan jarak ideologi	- Sistem relatif partai - Pluralisme moderat - Pluralisme terpolarisasi - Sistem partai yang berkuasa

Dari tabel di atas, kelihatan beberapa cara melakukan klasifikasi sistem kepartaian. Maurice Duverger melakukannya menurut jumlah partai, Robert Dahl menurut skala kompetisi yang opositif, Blondel melakukan menurut ukuran jumlah dan besar partai secara relatif dan Giovanni Sartori menurut jumlah partai dan jarak ideologi antar partai-partai tersebut.

5.2 Syarat untuk Menjadi Anggota Partai

Persyaratan itu diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012 pasal 51, menulis tentang persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Telah berumur 21 tahun atau lebih
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia
5. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945

BAB VI

PERATURAN PERUNDANGAN- UNDANGAN ORMAS, PARPOL DAN PILEG

Pengertian ORMAS

Dalam Undang-Undang no 17 tahun 2013 ini yang dimaksudkan ormas yaitu Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, pendapat, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tentang Ormas. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat RT adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

a. Pasal 5 ormas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

b. Pasal 6 Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/ atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/ atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6.2 Hak dan Kewajiban Ormas

Pasal 20

Ormas berhak:

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Pasal 21

Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

d. Larangan untuk ormas

Pasal 59